

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
DALAM PEMILUKADA TAHUN 2020
(STUDI DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA)
KOTA MEDAN SUMATERA UTARA**

Agnes Meyvalita Tarigan

NPP. 29.0079

Asdaf Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email:

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The writer's research into the amount of public political participation in the 2020 Regional Head Election in Medan Helvetia District, Medan City, which resulted in the writing of this thesis, can still be said to be low because it has not reached the national average of 77.5 percent. **Purpose:** The writer's goal is to address the issue of community political participation in post-conflict local elections in order to discover and analyze the reasons for the community's low participation in post-conflict local elections, particularly in the District of Medan Helvetia. **Method:** In writing this thesis, the writer employs a descriptive qualitative method with an inductive approach, as well as data collection techniques such as interviews and documentation. The author applies a theory related to the factors of high and low levels of community political participation to analyze the problem. **Result:** After conducting research, there are several factors that influence the level of community political participation in the 2020 Regional Head Election in Medan Helvetia District, Medan City, North Sumatra, including social status related to the level of community education where people with higher education are usually more aware and understand the importance of one voice. they donate, descendants can also have an influence on the level of community political participation, because people with high social status tend to be active in participating can leave their job. The political affiliation factor of parents, since children, particularly inexperienced voters, prefer to emulate their parents' decisions. **Conclusion:** Someone who works in an organization, particularly a political group, can have an impact on the amount of community engagement. Typically, political groups encourage us to love our motherland. The author hopes that every representative of the people who has been given the mandate to preserve public confidence so that it does not decrease public faith in the government and the community may actively offer their opinions.

Keywords: Political Participation, Regional Head Election

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Penulisan skripsi ini sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melihat jumlah partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu tahun 2020 di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan masih dapat dikatakan rendah karena belum mencapai rata-rata nasional yaitu sebesar 77,5%. **Tujuan:** Adapun tujuan penulis mengangkat masalah partisipasi politik masyarakat dalam pemilu untuk mengetahui dan menganalisis alasan mengapa rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam pemilu khususnya di Kecamatan Medan Helvetia. **Metode:** Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif serta pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis permasalahan, penulis menggunakan teori yang berkaitan dengan faktor tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat. **Hasil/Temuan:** Setelah melakukan penelitian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Tahun 2020 di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara diantaranya dari status sosial berkaitan dengan tingkat Pendidikan masyarakat dimana masyarakat berpendidikan tinggi biasanya lebih paham dan mengerti arti pentingnya satu suara yang mereka sumbangkan, keturunan juga dapat memberi pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat, karena masyarakat dengan status sosial tinggi cenderung aktif dalam berpartisipasi. Faktor selanjutnya, status ekonomi berkaitan dengan jenis pekerjaan seseorang juga dapat mempengaruhinya karena jika masyarakat yang bekerja sebagai pedagang dan penyedia jasa tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka. Faktor afiliasi politik orang tua, karena anak cenderung meniru pilihan orang tuanya terutama pemilih pemula. **Kesimpulan:** Seseorang yang berada dalam sebuah organisasi terkhususnya organisasi politik dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Biasanya dalam organisasi politik mengajarkan kita agar mencintai tanah air. Penulis berharap setiap wakil rakyat yang sudah diberikan amanah agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat sehingga tidak mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dan masyarakat dapat aktif menyumbangkan suaranya.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses demokrasi bukan hanya dilakukan di jenjang pemerintahan pusat tetapi sampai pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu bentuk demokrasi di tingkat daerah adalah pilkada. Pilkada adalah satu kegiatan eksis yang diikuti oleh masyarakat yang tercatat sebagai pemilih di daerah tersebut.

Mewujudkan kedaulatan rakyat di suatu daerah dapat diaplikasikan apabila pemilihan secara langsung dilakukan perorangan dalam memberikan partisipasi politiknya melalui hak suaranya secara langsung di bilik pemungutan suara. Penulis berpandangan dalam perjalanan politik masyarakat harus bisa memanfaatkan momentum ini dalam rangka mengakomodir permasalahan-permasalahan mereka, dengan itu diharapkan bisa mengurangi setiap problem yang mereka rasakan selama ini.

Suksesnya pelaksanaan pilkada tergantung dari kinerja yang dilakukan KPU. Sebelum pilkada dilaksanakan KPU melakukan sosialisasi yang berguna untuk mendapatkan gambaran utuh tentang strategi apa yang benar-benar tepat sehingga dapat memberi dampak positif dan sesuai dengan harapan. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan melalui komunikasi contohnya melalui ceramah, media dan alat peraga yang dapat di pasang di lokasi ramai lalu lintas publik. Berdasarkan data yang dihimpun Lembaga Komisi Pemilihan Umum terdapat 270 daerah yang mengikuti pilkada diantaranya 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali ini untuk memilih kepala pemerintahan di daerah masing-masing khususnya di

Sumatera Utara. Salah satunya Kota Medan ikut meramaikan pilkada tahun 2020 yaitu 23 kabupaten/kota.

Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjelaskan bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 maka dilakukan penundaan pemilihan secara serentak.

Pentingnya pilkada secara langsung oleh rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai oligarki pimpinan partai dalam menentukan pasangan kepala daerah yang dulu ditentukan oleh DPRD selain itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas kedaulatan dan partisipasi rakyat. Dengan adanya sistem pemilihan secara langsung rakyat sudah disebut berpartisipasi dalam politik karena masyarakat ikut memberikan suara dan ikut mengawasi kegiatan pemilihan suara.

Pilkada tahun 2020 Menurut data yang diperoleh dari KPU Kota Medan sebanyak 1.601.001 yang terdaftar sebagai pemilih sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya 748.822 pemilih. Tingkat partisipasi pemilihnya hanya 46,77%. Jika dilihat pilkada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 banyak pemilih hanya 507.351 tetapi di tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah partisipasi menjadi 748.882, hal ini bukan menjadi suatu kebanggaan karena belum biasa sesuai dengan ekspektasi.

Walaupun dapat dikatakan bahwa Kota Medan adalah Kota Metropolitan yang seyogyanya masyarakatnya lebih melek terhadap demkorasi ternyata tidak berbanding lurus dengan

kenyataannya. Tingkat kemajuan suatu daerah bukan jaminan terhadap tingkat partisipasi masyarakat yang mendiami daerah tersebut.

Alasan rendahnya angka partisipasi dalam pemilu pada tahun 2020 dikarenakan masyarakat yang malas, cuek, ataupun takut terkena virus covid-19. Alasan lainnya banyaknya orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan banyak masyarakat yang terjebak lockdown menjadi penghalang masyarakat yang merantau tidak bisa ikut menyuarakan hak mereka. Menurut Staf Teknis dan Hupmas KPU Kota Medan pengurangan jumlah DPT pilkada tahun 2020 disebabkan karena berbagai alasan yaitu masyarakat yang berpindah administrasi kependudukan, masyarakat yang sudah meninggal dunia, dilakukannya pembersihan atas DPT ganda dan berbagai alasan lainnya.

Untuk mewujudkan pemilu perlunya partisipasi masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan legitimasi hasil pemilu karena dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin rakyat di parlemen. Menurut Budiardjo (2008) partisipasi masyarakat di bidang politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok yang ikut serta dengan memilih pemimpin dalam pemerintahan secara langsung atau tidak. Partisipasi masyarakat melalui suaranya berkaitan juga dengan kepercayaan rakyat terhadap sistem pemilu yang akan menjadi wakil mereka dalam penyaluran aspirasi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Latar belakang permasalahan penelitian yang saya lakukan adalah Jumlah partisipasi masyarakat masih belum sempurna yang berarti belum semua masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya suara yang mereka berikan pada saat pemilihan berlangsung. Dari dua tabel diatas, partisipasi pemilih di tahun 2015 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini menjadi

kebanggaan tersendiri karena pada tahun 2020 Indonesia sedang maraknya pandemi virus covid-19 tetapi tidak menjadi hambatan untuk tetap melaksanakan pesta demokrasi di tingkat kota yang sudah rutin dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Untuk mendapatkan data mengenai bagaimana partisipasi politik masyarakat pada pilkada serentak, faktor pendukung dan penghambatnya serta upaya mengatasi hambatan partisipasi politik masyarakat maka penulis memperkecil fokus penelitian di Kecamatan Medan Helvetia yang hanya menghasilkan 45,2% suara saja. Hal ini membuktikan bahwa Kecamatan Medan Helvetia belum mencapai tingkat partisipasi sebesar 77,5% sesuai dengan target nasional. Dengan latar belakang yang tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung di Kecamatan Medan Helvetia serta mengambil fokus penelitian dan judul : “PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA TAHUN 2020 (STUDI DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA) KOTA MEDAN SUMATERA UTARA”

1.3. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang pemberdayaan fakir miskin telah dilakukan oleh 3 peneliti yang dimana penelitian yang dilakukan Daud M.Liando yaitu “PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (STUDI PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN MINAHASA”, penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Artiti berjudul “PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA DENPASAR”, dan penelitian yang dilakukan Deddy Christian Sinaga dkk berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA (STUDI KASUS: PEMILIHAN UMUM KEPALA

DAERAH TAHUN 2015 DI KECAMATAN MEDAN MAIMUN)” yang dimana dari 3 penelitian terdahulu ini terdapat perbedaan. Dari ketiga penelitian itu terdapat perbedaan hasil penelitiannya dilihat dari fokus permasalahan. Yang pertama tingkat partisipasi masyarakat dikarenakan data DPT yang tidak jelas. Penelitian yang selanjutnya terjadi peningkatan partisipasi politik karena mobilisasi yang dan penelitian yang ketiga menyimpulkan bahwa banyak masyarakat besikap golput karena menganggap pemilu tidak memiliki pengaruh.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang digunakan sebelumnya untuk mendapatkan bahan ataupun materi perbandingan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian penulis sekarang. Berikut dalam kajian pustaka meletakkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya :

1. Hasil penelitian Daud M.Liando yaitu “PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (STUDI PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN MINAHASA”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat terus berlangsung tetapi yang menjadi masalahnya adalah kurangnya motivasi yang ada dalam diri masyarakat. Masyarakat sebagian besar tidak ikut memberikan suaranya dikarenakan tidak terdaftar di DPT ataupun tidak mengetahui data terpaut kewajiban selaku pemilih
2. Hasil penelitian yang dilakukan Ni Ketut Artiti berjudul “PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA DENPASAR”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hasil dari pileg serta pilpres di

Kota Denpasar mengalami peningkatan dan penyusutan. Melaporkan bahwa upaya sosialisasi partisipasi politik ialah bagian penting dalam suatu pemilu.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deddy Christian Sinaga dkk berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA (STUDI KASUS: PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DI KECAMATAN MEDAN MAIMUN)” Melaporkan bahwa masyarakat di Kecamatan Medan Maimun Kota Medan yang terdaftar di DPT tidak memakai hak pilihnya pada pemilu kepala daerah Kota Medan di Kecamatan Medan Maimun tahun 2015. Banyak masyarakat yang sudah berada di kategori golput pragmatis, dikarenakan mereka apatis akan pemilu yang berjalan pada saat ini dengan anggapan yang terbangun bahwa suara yang dimiliki tidak sangat mempengaruhi terhadap hasil pemilu.

1.5. Tujuan.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Partisipasi Politik Masyarakat Pemilukada tahun 2020 di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan mengatasi faktor penghambat partisipasi politik masyarakat dalam pemilukada tahun 2020 di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilukada di Kota Medan tahun 2020..

II. METODE

Bapak dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan TEORI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT. Yang mengartikan tinggi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kesadaran politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu Status sosial, Status ekonomi, Afiliasi politik orang tua, Pengalaman berorganisasi. Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Yaitu kajian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Perpu Nomor 2 Tahun 2020

,PKPU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu. Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori Partisipasi Politik Masyarakat maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

Setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama analisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion

drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada Tahun 2020 Di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara

Indonesia memiliki bentuk pemerintahan yang membebaskan warganya memiliki hak yang setara dalam menentukan pilihan hidupnya. Secara sederhananya bentuk pemerintahan Indonesia adalah berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Salah satu manfaat demokrasi yaitu menjamin hak-hak dasar warganya memungkinkan masyarakat untuk memiliki hak bebas berbicara, berpendapat, berekspresi dan lain sebagainya untuk terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik. Salah satu kebebasan yang diberikan kepada masyarakat adalah dalam menentukan pemimpinnya sendiri yang sesuai dengan persyaratan dan kemampuan yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di Kota Medan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan tujuan adanya regenerasi dalam program kerja sehingga tidak menciptakan pemimpin yang egois dan serakah serta semena-mena seperti yang terjadi saat masa pemerintahan Presiden sebelum Reformasi.

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan sebagai sarana masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai

keinginan hati nurani, sedangkan jika masyarakat menilai tidak ada sosok pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas dan bisa diharapkan, maka masyarakat dibebaskan dan tidak dipaksakan untuk melakukan pemilihan umum. Oleh karena itu, pemilihan umum sendiri tidak akan bisa dikatakan mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang sempurna diakibatkan masyarakat hanya diberikan sarana untuk berpartisipasi tanpa adanya paksaan atau kewajiban dalam berpartisipasi.

Berdasarkan hasil temuan penulis di KPU Kota Medan dan Kecamatan Medan Helvetia menyatakan bahwa tinggi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kesadaran politik masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

1. Status Sosial

Berdasarkan Ekspose Kecamatan Medan Helvetia penulis berpendapat bahwa tingkat Pendidikan dan sumber pendapatan masyarakat sangat berpengaruh kepada tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilukada tahun 2020. Hal ini juga semakin dikuatkan dengan wawancara saya dengan Edison yang bekerja sebagai pedagang pada tanggal 14 Januari 2022 menyatakan bahwa:

“Saya tahu diadakannya pemilukada tahun 2020 tetapi karena pekerjaan saya sebagai pedagang memaksa saya untuk tetap bekerja. Apalagi saat itu memang hari libur jadi pasti lebih banyak orang berbelanja ke pasar. Jika saya lebih memilih ke TPS maka penghasilan saya akan berkurang ditambah lagi jumlah pedagang yang banyak dan persaingan juga ketat,”

Berdasarkan jumlah DPT Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada Kota Medan ialah sebanyak 53,2% masyarakat dinyatakan golput. Tidak tahu jelas apa yang menyebabkan masyarakat lebih memilih golput daripada meluangkan waktu sebentar untuk memilih kepala daerah mereka yang baru demi Kota Medan yang jauh lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara saya Bersama Bapak Edy Suhartono selaku Komisioner KPU Kota Medan bagian Parmas dan SDM pada hari Senin, 10 Januari 2022 yang menyatakan bahwa:

“Pada pemilukada walikota dan wakil walikota Kota Medan sebanyak 852.179 dari 1.601.001 memilih golput. Banyak alasan mengapa masyarakat memilih golput diantaranya mungkin mereka sedang berada di luar kota pada saat pemilihan berlangsung atau karena pada saat itu Indonesia khususnya Kota Medan sedang dalam kondisi pandemic Covid-19 menyebabkan masyarakat takut tertular virus tersebut. Padahal kami dari KPU sebagai penyelenggara sudah membuat strategi seperti pembatasan jumlah peserta pemilihan per TPS dan juga protokol kesehatan bagi panitia dan masyarakat yang hendak memilih.”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa salah satu kemungkinann yang menjadi penyebab banyaknya suara golput, yaitu pandemi covid-19 yang menjadi penghalang masyarakat untuk memilih di daerah asalnya. Lockdwon menjadi salah satu keputusan pemerintah untuk mengurangi penyebaran covid-19 di Indonesia dan kita sebagai warga negara harus patuh dan menerima kebijakan tersebut. KPU belum mempunyai solusi untuk masalah ini jika ingin pemilihan dilakukan secara online maka, kemurnian suara yang diberikan tidak bisa dipercayai mengingat asas langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil sebagai asas dalam pemilihan.

2 Status Ekonomi

Pembagian masyarakat berdasarakan pedapatan, pengeluaran maupun kepemilikan atas benda berharga menentukan tingkat partisipasi masyarakat, tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Bapak Alexander Sinulingga, S.STP, M.Si yang berprofesi sebagai Plt. Camat Medan Helvetia, beliau menyatakan bahwa:

“Menurut saya status ekonomi tidak mempengaruhi minat seseorang dalam menyoblos pada pemilukada karena sebenarnya tidak bias menjadi alsan jika kita tidak bisa ikut memilih karena pekerjaan, padahal jika pemilukada berlangsung biasanya akan menjadi hari libur nasional di seluruh Indonesia. Memilih juga tidak memakan waktu yang banyak dan juga semua TPS dekat dengan alamat DPT”.

Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa sekalipun masyarakat tersebut berasal dari kelas atas dan bawah jika memang memiliki niat untuk meyoblos pasti akan diberikan waktu luangnya sesibuk apapun mereka.

3 Afiliasi Politik Orang Tua

Berdasarkan wawancara penulis Bersama Bapak Zarfani Matondang selaku Ketua PPK Kecamatan Medan Helvetia pada 15 Januari 2022 menyatakan bahwa:

“Pemilih pemula masih bisa, tetapi yang sulitnya adalah lansia. Tingkat apatis masyarakat cukup tinggi, tidak ada perubahan. Mengapa tingkat masyarakat menurun karena mereka melihat satu faktor dari calon. Orangny seperti apa, apakah saya kenal, visi-misi dari calon seperti apa. Bagi kaum pemilih pemula masih memiliki rasa bangga, namun pemilih lansia mereka jenuh, karena tidak ada perubahan.”

Namun menurut penulis afiliasi politik tidak hanya mengenai tentang pemilih pemula saja ada namanya KKN, karena mungkin keluarganya adalah tim kemenangan banyak yang menggunakan hak pilih karena hanya disuruh datang saja padahal pemikiran mereka tidak ada gunanya datang dan tidak ada gunanya pemimpin untuk mereka. Sependapat dengan saya yaitu Martogi pada tanggal 14 Januari 2022 selaku masyarakat Kecamatan Medan Helvetia yang menyatakan bahwa:

“Pada pemilukada tahun 2020 kemarin saya tidak memilih karena saya melihat tidak adanya perubahan yang dibuat oleh pemerintah yang lalu pada Kota Medan apalagi untuk pemilihan walikota dan wakil walikota tahun ini calonnya berasal dari keluarga terpandang dan sudah diprediksi siapa yang akan menang”.

Pemilukada tahun 2020 di Kota Medan memang sedikit berbeda jika dilihat dari calonnya yaitu menantu Presiden Jokowi. Hal ini menjadi bahan perbincangan apalagi karena Pak Bobby Nasution terpilih sebagai walikota Kota Medan. Gosip tentang politik dinasti pun mencuat karena dinilai pak Bobby Nasution masih sangat awam tentang dunia politik tetapi kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan bahwa Pak Bobby tidak becus bekerja. Pilihannya sebagai calon walikota

pasti sudah dipikirkan matang-matang dan kita sebagai masyarakat sebaiknya mendukung program yang dibuat untuk kemajuan Kota Medan.

4. Pengalaman Berorganisasi

Semakin Orang yang lebih lama berada dalam suatu organisasi akan tahu bagaimana mengambil hati dari masyarakat. Semangat yang dibangun dalam organisasi adalah semangat pantang menyerah. Dalam organisasi juga diajarkan bagaimana berkomunikasi yang baik dengan siapa saja dan bagaimana mengambil hati masyarakat. Oleh karena itu, para calon walikota dan wakil walikota biasanya diusulkan oleh sebuah partai politik. Partai politik sebagai organisasi politik .

3.2 Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2020 Di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara

1. Faktor Pendukung Internal

Jika semakin besar hal yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan maka semakin efektif program dalam suatu organisasi tersebut. Begitu juga hal yang dilakukan oleh KPU pada pemilu tahun 2020 di Kota Medan. Ditengah-tengah pandemic covid-19 yang tinggi KPU dengan bertanggung jawab tetap melaksanakan kampanye dengan protokol kesehatan yang ketat agar masyarakat bias menilai langsung figure calon walikota dan wakil walikota. Tidak hanya itu pada pelaksanaan pemilihan pun KPU memperluas jumlah TPS untuk menghindari terjadinya pemadatan di setiap TPS.

KPU juga mempunyai program Rumah Pintar Pemilu yang berguna untuk membentuk generasi muda yang mengerti nilai-nilai demokrasi. Dari program tersebut diharapkan generasi muda apat menjadi pemilih yang cerdas atau bahkan dapat menjadi pemimpin yang memiliki kualitas dan integritas serta membuat kebijakan yang memihak pada kesejahteraan masyarakatnya.

2. Faktor Pendukung Eksternal

Pengalaman dalam berorganisasi dapat menjadi faktor pendukung masyarakat dalam berpartisipasi khususnya dalam memberikan suara mereka pada saat pemilu. Partisipasi memiliki peranan yang penting, baik bagi setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat, maupun bagi pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara.

Bentuk partisipasi politik masyarakat paling sederhana yang dapat dilihat adalah dengan mengikuti pemilihan umum. Dalam mengikuti pemilihan umum dapat diukur sejauh mana masyarakat dalam suatu perkumpulan atau kelompok dapat berperan aktif dalam kegiatan pemilu. Untuk berperan dalam kegiatan pemilihan umum, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri.

3.3 Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Di Kota Medan Tahun 2020 Peningkatan mutu pelayanan sosial kepada masyarakat miskin

Berdasarkan hasil penelitian selama kegiatan berlangsung, penulis mencoba untuk mengurai beberapa upaya dari KPU Kota Medan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat sebagai berikut:

1. Adanya Rumah Pintar Pemilu yang merupakan program dari KPU RI sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat untuk mengetahui seluk beluk pemilu
2. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat mulai dari tingkat pemilih pemula sampai pemilih lansia dan juga penyandang disabilitas. Dengan pendidikan politik, masyarakat akan mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.
3. Melaksanakan sosialisasi dengan berbagai pihak dan dengan berbagai cara. Dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan partai politik serta tokoh masyarakat agar ikut mensosialisasikan mengenai pemilu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edy Suhartono selaku Komisioner KPU Kota Medan bagian Parmas dan SDM pada hari Senin, 10 Januari 2022 mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi tentang Pendidikan politik kepada pemilih pemula dan juga dengan membuat program Rumah Pintar Pemilu”.

Rumah Pintar Pemilu sedang gencar dipublikasikan oleh KPU Kota Medan kepada masyarakat. Oleh karena itu, KPU Kota Medan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga Pendidikan dan sebagainya. Ada beberapa strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Medan seperti yang disampaikan oleh pihak Komisioner KPU Kota Medan yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Medan sendiri lewat program dan menggunakan anggaran sendiri.
2. KPU Kota Medan yang mengisi acara sosialisasi dengan menjadi narasumber tetapi instansi lain yang mengundang.
3. Memaksimalkan media sosial, media cetak, dan media TV Nasional dan Regional.
4. Memaksimalkan Rumah Pintar Pemilu kepada semua segmen elemen masyarakat Sumut.
5. Memperluas sasaran sosialisasi dengan membuat Relawan Demokrasi. Relawan demokrasi bisa mendemonstrasikan cara menyoblos yang baik dan benar.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Proses demokrasi bukan hanya dilakukan di jenjang pemerintahan pusat tetapi sampai pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu bentuk demokrasi di tingkat daerah adalah pilkada. Pilkada adalah satu kegiatan eksis yang diikuti oleh masyarakat yang tercatat sebagai pemilih di daerah tersebut. Sebelum pilkada dilaksanakan KPU melakukan sosialisasi yang berguna untuk mendapatkan gambaran utuh tentang strategi apa yang benar-benar tepat sehingga dapat memberi dampak positif dan sesuai dengan harapan. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan melalui komunikasi contohnya melalui ceramah, media dan alat peraga yang dapat di pasang di lokasi ramai lalu lintas publik. Alasan rendahnya angka partisipasi dalam pemilu pada tahun 2020 dikarenakan masyarakat yang malas, cuek, ataupun takut terkena virus covid-19. Alasan lainnya banyaknya orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan banyak masyarakat yang terjebak *lockdown* menjajadi penghalang masyarakat yang merantau tidak bisa ikut menyuarakan hak mereka. Menurut Staf Teknis dan Hupmas KPU Kota Medan pengurangan jumlah DPT pilkada tahun 2020 disebabkan karena berbagai alasan yaitu masyarakat yang berpindah administrasi kependudukan, masyarakat yang sudah meninggal dunia, dilakukannya pembersihan atas DPT ganda dan berbagai alasan lainnya.

IV. KESIMPULAN

Selama penulis melakukan penelitian di KPU Kota Medan dan di Kecamatan Medan Helvetia terdapat analisis data yang telah dijabarkan pada pembahasan kemudian penulis mengambil kesimpulan antara lain:

1. Tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Medan Helvetia yaitu sebesar 45,8% dan belum memenuhi target nasional yaitu sebesar 77,5%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang masih mementingkan pekerjaan dan belum sadar terhadap pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah terutama pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota.

2. a. Faktor yang mendukung dan menghambat Partisipasi Politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara

1. Tingkat Pendidikan Pemilih
2. Afiliasi Politik Orang tua bagi pemilih pemula
3. Pemilih tergabung dalam sebuah Organisasi
4. Status Sosial Calon Kepala Daerah
5. Tingkat Kekayaan Calon Kepala Daerah

b. Faktor yang menghambat pemilih

1. Rendahnya kondisi ekonomi pemilih
2. Rendahnya kepercayaan politik
3. Rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat
4. Masyarakat lebih memilih pekerjaannya
5. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilukada masih sangat rendah

3. Melihat kenyataan dilapangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ada upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Medan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Adanya Rumah Pintar Pemilu yang merupakan program dari KPU RI sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat untuk mengetahui seluk beluk kepemiluan

2. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat mulai dari tingkat pemilih pemula sampai pemilih lansia dan juga penyandang disabilitas. Dengan pendidikan, masyarakat akan mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

3. Melaksanakan sosialisasi dengan berbagai pihak dan dengan berbagai cara. Dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan partai politik serta tokoh masyarakat agar ikut mensosialisasikan mengenai pemilu.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni komunikasi antar narasumber karena jadwal yang bertabrakan.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Sebaiknya masyarakat lebih antusias lagi saat pemilihan di tingkat provinsi samapai pada tingkat kabupaten/kota.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kecamatan Medan Helvetia beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A, R. (2012). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Aan Komariah dan Djam'an Satori. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Adianus Pito, Toni, dkk. *Mengenal teori-teori politik dari sistem politik sampai korupsi*, Cet1. Bandung: Penerbit Nuansa, 2006.

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Basrowi. 2014. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia

Brannen, J. (2017). *Memadu Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Creswell, J. W. (2017). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.

Pito, T. A. (2013). *Mengenal Teori-teori Politik*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Soetomo. (2009). *Pemabangunan Masyarakat Membangun Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu politik*. Jakarta: PT Grasindo.

Yusuf. (2014). *Metode Peneltian: Kuantitaif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

B. JURNAL

Liando, Daud M. "PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3.2 (2017): 14-28.

Arniti, Ni Ketut. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4.2 (2020): 329-348.

Sinaga, Deddy Christian. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Menggunakan Hak Pilihnya (Studi Kasus: Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan Tahun 2015 di Kecamatan Medan Maimun)." (2018).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu

SUMBER-SUMBER LAIN

<https://kpud-medankota.go.id/>

<http://medanhelvetia.pemkomedan.go.id/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Medan_2020

<https://kumparan.com/@kumparantravel/5-fakta-unik-medan-kota-terbesar-ke-3-di-indonesia>

medankota.bps.go.id

